



**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

Terakreditasi A

SK BAN-PT No: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/20190

**Privatisasi Militer sebagai Upaya Pemenuhan
Kepentingan Amerika Serikat di Irak**

Skripsi

Oleh
Kezia Febrina
2017330199

Bandung

2021



**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

Terakreditasi A

SK BAN-PT No: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/20190

**Privatisasi Militer sebagai Upaya Pemenuhan
Kepentingan Amerika Serikat di Irak**

Skripsi

Oleh
Kezia Febrina
2017330199

Pembimbing
Dr. I Nyoman, Drs., M.Si.

Bandung

2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan International
Program Studi Ilmu Hubungan International



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama Kezia Febrina
Nornor Pokok 2017330199
Judul Privatisasi Militer sebagai Upaya Penuhan Kepentingan Amerika Serikat di Irak

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Senin, 25 Januari 2021
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua Sidang merangkap anggota

Idil Syawfi, S.IP., M.Si

: 

Sekretaris

Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M Si.

: 

Anggota

Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A.

: 

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

Surat Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kezia Febrina
NPM : 2017330199
Jurusan/Program Studi : Hubungan Internasional
Judul : Privatisasi Militer sebagai Upaya Pemenuhan Kepentingan Amerika Serikat di Irak.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain, adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Jakarta, 3 Januari 2021



Kezia Febrina

ABSTRAK

Nama : Kezia Febrina
NPM : 2017330199
Judul : Privatisasi Militer sebagai Upaya Pemenuhan Kepentingan Amerika Serikat di Irak

Berlatar pada tragedi 9/11, peningkatan kapabilitas keamanan menjadi agenda utama Amerika Serikat kepemimpinan George W. Bush Jr. Aksi ‘War on Terror’ yang berawal di Afghanistan pada akhirnya membuahkan Invasi Irak pada tahun 2003. Konflik bersenjata yang berkepanjangan pun muncul sebagai aksi AS mendapatkan kepentingannya di Irak. Seiring berjalannya operasi militer, Tidak sedikit hambatan muncul dan memerlukan jalan keluar dalam penyelesaiannya. Penggunaan keamanan swasta pada akhirnya menjadi salah satu pilihan AS sebagai upaya dalam mempertahankan kedudukannya di Irak. **“Bagaimana Amerika Serikat menjadikan *Private Military Contractors* sebagai strategi alternatif dalam mencapai kepentingannya dalam operasi militer di Irak?”** muncul sebagai pertanyaan penelitian. Adapun penelitian ini memusatkan kajian pada latar belakang munculnya hambatan dimana hal tersebut berpengaruh pada penggunaan militer privat.

Mendasarkan perspektif pada Teori Realisme, dapat diketahui bahwa pada dasarnya; 1. Privatisasi keamanan mendominasi sebagaimana kegagalan operasi militer terjadi terkait disfungsi administrasi, kebijakan salah arah, dan ketidakpercayaan masyarakat lokal mengingat kekosongan rezim akibat penggulingan Saddam Hussein. 2. Penggunaan jasa militer privat diyakini sebagai jalan keluar sebagaimana muncul kepercayaan hal ini akan menghindari AS dari tuntutan peradilan terkait imunitas yang dimiliki PMC. Lebih daripada itu, jasa PMC dinilai lebih cepat dan tanggap dalam melaksanakan tugas 3. Upaya pemenuhan kepentingan nasional mengutamakan *political act* terkait *political cost* dalam mencapai keuntungan masing-masing aktor 4. Tingkat efektivitas dinilai relatif untuk diukur dan tidak dapat dipastikan. Hal tersebut mengingat fakta dilapangan yang menyatakan tujuan penggunaan PMC sebagai penghematan biaya berbanding terbalik dengan kenyataan bahwa pelanggaran yang dilakukan telah memakan biaya yang banyak pula.

Kata Kunci: Amerika Serikat, Irak, Perang Irak, Private Military Contractors, Security Governance

ABSTRACT

Name : Kezia Febrina
NPM : 2017330199
Title : Military privatization as the United States Attempt to Achieve its Interest in Iraq

Recollecting on the tragedy of 9/11, the enhancement of security capabilities became the United States' main agenda under George W. Bush Jr.'s governance. The actions of 'War on Terror' began in Afghanistan and eventually led to the invasion of Iraq in 2003. The protracted armed conflict finally emerged as US urgency appeared in achieving their interest in Iraq. As the military operation progresses, many obstacles arise and require a way out in its resolution. The privatisation of security finally became one of the options as the effort to maintain its domination in Iraq. "How the United States made Private Military Contractors as their alternative strategy in achieving its interest through military operations in Iraq?" formed as this thesis' research question. In addition, This research basically put its focus on the obstacles' background which affected the use of the private military.

Constructing the perspective based on the Realism theory, we can conclude that; 1. The privatization of security played a prominent role as the failure of military operations occurred due to administrative dysfunction, misguided policies, and distrust by the locals. Those arose regarding the absence of regimes due to the overthrow of Saddam Hussein. 2. The use of private military services is believed to be useful as there is a belief that this will prevent the US from being prosecuted by the judiciary regarding PMC's immunity. Moreover, PMC services are considered to be faster and responsive in carrying out their duties. 3. The fulfilment of national interest prioritized political acts regarding political cost to achieve benefits for all parties. 4. The effectiveness of PMC is considered relative to be measured and cannot be ascertained. This due to the cost savings as one of the main purpose of the usage of PMC is inversely proportional as violations could cost a lot.

Keywords: *United States, Iraq, Iraq War, Private Military Contractors, Security Governance*

Kata Pengantar

Segala puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya yang telah menyertai penulis dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: **"Private Military Contractors Sebagai Strategi Alternatif Amerika Serikat: Studi Kepentingan AS di Irak."** Penelitian ini ditujukan sebagai pemenuhan mata kuliah skripsi dan pemenuhan syarat kelulusan program Strata-1 (S1) Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Adanya ketertarikan penulis terhadap pola perilaku pemerintah AS pada akhirnya membuahakan pertanyaan penelitian mengenai kebijakan luar negeri pasca tragedi 9/11. Mendasarkan pemikiran dan perspektif melalui Teori Realisme oleh Morgenthau, beberapa konsep lain pun digunakan dalam memperdalam pembahasan. Pada akhirnya, diharap penelitian ini dapat menjawab latar belakang penggunaan keamanan swasta dalam menjadikannya pilihan lain oleh AS terkait pencapaian kepentingannya di Irak.

Penulis ingin berterima kasih kepada Mas Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi atas segala masukan dan pembelajaran yang disampaikan. Adapun penulis juga berterima kasih kepada pembaca atas ketersediaannya dalam membaca skripsi ini. Segala saran dan kritik sangat diharapkan sebagai masukan yang akan berguna di kemudian hari.

Jakarta, 3 Januari 2021

Kezia Febrina

Ucapan Terima Kasih

Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini. Juga kepada beberapa pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, penulis menyampaikan terima kasih atas segala bantuannya.

Tuhan Yang Maha Esa,

Puji syukur penulis panjatkan atas berkat, rahmat, dan perlindungan Mu, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Adapun apa yang saya capai hanya untuk memuliakan nama-Mu saja.

Keluarga

Terima kasih kepada mama dan papa atas kasih sayang, dukungan, dan perhatian yang terus diberikan selama skripsi ini, baik secara moral ataupun materiil. Terima kasih telah menjadi seorang panutan dalam memberikan masukan dan terus sabar dalam memberi motivasi disetiap keluh kesah. Terima kasih untuk tetap setia dalam merawat dan mengurus saya yang sering kali keras kepala dan mudah menyerah dalam menghadapi suatu masalah. Adapun kepada kakak saya, Joshua, saya berterima kasih karena telah mau menjadi teman berbagi keluh kesah selama penulisan skripsi ini.

Mas Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si

Terima kasih atas ketersediaan Mas Nyoman untuk membimbing penulis selama proses pengerjaan dan penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas segala arahan, masukan, dan motivasi yang sangat berguna tidak hanya pada saat ini namun dimasa yang akan datang. Terima kasih atas kesabarannya dan mohon maaf atas segala kesalahan yang penulis lakukan selama bimbingan.

Terima kasih terkhusus kepada, **Gracia Grand Dinarta, Zincka Neyla, Stella Nostra, Jessica Ruth, Alya Khalida, dan Inez Ignatzia.** Terima Kasih penulis sampaikan karena telah menjadi teman seperjuangan selama penulisan skripsi ini. Terima kasih juga karena telah menemani 3,5 tahun proses perkuliahan dari awal semester hingga semester 7 ini. 1 tahun terakhir mungkin tidak bisa kita lewati bersama seperti dulu, namun penulis tetap bersyukur atas ketersediaan kalian untuk tetap berbagi cerita. Lebih daripada itu, terima kasih atas segala bentuk dukungan yang penulis terima selama proses penulisan skripsi.

Teman-teman Grup Bimbingan

Terima kasih kepada Karin, Glenn, Cherish, Afi, Laksmi, Thea, Grace, Lingkan, dan Jessica atas kerjasamanya dalam berbagi informasi selama proses pengerjaan dan penyelesaian skripsi. Terima kasih untuk tidak menjadi individualis dan saling memberi masukan pada saat bimbingan. Terakhir, terima kasih telah menjadi teman seperjuangan dan berbagi keluh kesah selama 6 bulan belakangan ini.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
Kata Pengantar	iii
Ucapan Terima Kasih	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR AKRONIM	x
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.2.1 Deskripsi Masalah.....	6
1.2.2 Pembatasan Masalah	8
1.2.3 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	9
1.3.1 Tujuan Penelitian	9
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	9
1.4 Kajian Literatur	10
1.5 Kerangka Pemikiran	13
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	16
1.6.1 Metode Penelitian	18
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data	19
1.7 Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II Menguatnya Jaringan Terorisme Sebagai Ancaman Amerika Serikat: Irak Pasca Tragedi 9/11	22
2.1 Kepentingan Nasional Amerika Serikat di Irak	23
2.1.1 Penyebaran ideologi demokrasi	23
2.1.2 Sumber Daya Minyak.....	25
2.1.3 Kapabilitas Keamanan.....	29

2.2 Perkembangan Penggunaan PMC Terkait Tragedi 9/11	32
2.3 Perasaan Terancam Oleh Amerika Serikat	36
2.3.1 Munculnya Aksi Global War on Terror di Irak	37
2.3.2 Tuntutan Pembebasan Irak	40
BAB III Kehadiran <i>Private Military Contractors</i> dalam Invasi Irak Sebagai Upaya Pemenuhan Kepentingan	43
3.1 Operasi Militer Sebagai bentuk pengamanan kepentingan nasional dalam Mencegah Hambatan AS di Irak.	43
3.1.1 Pencegahan Hambatan Dalam Mencapai Kepentingan Nasional	46
3.1.2 Operasi Militer Irak sebagai bentuk <i>Defensive act</i>	49
3.2 Pemenuhan Kepentingan Terkait Kepentingan Kekuasaan Dalam Menganalisis Tuduhan AS terhadap Irak.	54
3.3 Privatisasi sebagai Bentuk <i>Political Act</i> Dalam Menjadikannya Upaya Pemenuhan Kepentingan.	57
3.3.1 Munculnya upaya opsional dalam mencapai kepentingan AS sebagai negara Hegemon	59
3.3.2 Kehadiran PMC dalam mengutamakan <i>political cost</i> yang mengabaikan akuntabilitas.....	62
3.3.3 Mengkaji Efektivitas Penggunaan PMC	67
BAB IV KESIMPULAN	70
DAFTAR PUSTAKA	73

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 aksi AS terhadap Irak dalam Iraq War.	44
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Produksi Minyak Mentah Irak per-Tahun	26
<i>Gambar 2. 2 Ekspor Minyak Mentah Irak 1980-2019</i>	<i>27</i>
Gambar 2. 3 Impor Minyak Mentah dan Produk Petroleum AS dari Irak.....	27
gambar 2. 4 Perbandingan Penggunaan Militer Nasional dan Privat di Irak.....	33
Gambar 2. 5 Jumlah Militer AS di Irak.....	38

DAFTAR AKRONIM

AAI	:	Ansar al-Islami
AS	:	Amerika Serikat
CACI	:	Consolidated Analysis Center, Incorporated
CIA	:	Central Intelligence Agency
CPA	:	Coalition Provisional Authority
MENA	:	Middle East and North Africa
MNF-I	:	Multi-National Force Iraq
PKK	:	Kurdistan Workers' Party
PMC	:	Private Military Contractors
PNAC	:	Project for a New American Century
WMD	:	<i>Weapon Mass Destruction</i>

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Munculnya Private Military Contractor (PMCs) sebagai aktor non-negara baru pasca perang dingin menarik perhatian banyak pihak dalam dunia internasional¹. Berawal dari maraknya penggunaan tentara bayaran pada konflik perang salib keenam juga seiring terjadinya revolusi operasi militer oleh Amerika, mendorong para aktor yang kerap kali terlibat dalam perang untuk melakukan pembaharuan dalam penyediaan jasa keamanan. Industri privatisasi militer pun pada akhirnya semakin meningkat seiring perkembangan pengetahuan dan teknologi². Melihat legalitas tentara bayaran yang sebagaimana diatur dalam *United Nations International Convention Against the Recruitment, Use, Financing, and Training of Mercenaries*, menyatakan adanya pengaturan mengenai penggunaan tentara bayaran. Didefinisikan sebagai perseorangan yang dibayar untuk berjuang dalam konflik bersenjata, penggunaan tentara bayaran sebagai pejuang dalam perang adalah ilegal hukumnya. Maka dari itu, munculnya perusahaan keamanan swasta diduga terbentuk guna mencegah ketidak legalan dari tentara bayaran. Terdapat beberapa jasa yang ditawarkan oleh aktor non-negara tersebut dalam mengundang klien nya. Jasa tersebut meliputi *manpower*, sekuritas, pelatihan, transportasi,

¹ Joel Baum, Anita McGahan, "Outsourcing War: The Evolution of the Private Military Industry after the Cold War", SSRN Electronic Journal, 2009, 10.2139/ssrn.1496498.

² *IBID.*

komunikasi, juga dari sisi teknologi seperti operasi sistem rudal dan layanan pusat data sebagai spesialisasi bagi perusahaan tersebut³.

Berfokus sebagai sebuah perusahaan militer swasta, keuntungan perusahaan menjadi tujuan utama dalam industri tersebut. Sikap *profit oriented* pun tampak pada para personel yang bekerja dibawah perintah atasannya guna mendapat keuntungan sebesar-besarnya⁴. Dalam beroperasi, PMCs menduduki posisi sebagai penyedia jasa dimana ketersediaan klien sebagai pengguna jasa dibutuhkan guna mendorong munculnya pekerjaan bagi perusahaan tersebut. Melihat dari sisi pengguna jasa, pada umumnya perusahaan keamanan swasta digunakan oleh pemerintahan suatu negara. Pada penugasannya, para personel swasta tersebut sering kali ditempatkan sebagai pengganti kekuatan militer daripada negara pengguna jasa⁵. Pergantian peran tersebut pun mencakup di banyak bidang, khususnya operasi militer. Konflik bersenjata, misi perdamaian, okupasi militer berkepanjangan, administrasi teritorial pada pembangunan institusional pasca konflik, juga perkumpulan intelijen menjadi beberapa contoh dari penugasan yang pada umumnya diberikan kepada para personel perusahaan militer swasta⁶.

Dijuluki sebagai negara *super power*, Amerika Serikat (AS) menilai kepentingan nasional sebagai suatu aspek krusial yang harus diperhatikan penuh. Hal tersebut pun berpengaruh pada stabilitas negara sebagai aspek krusial lainnya.

³ Joel Baum, Anita McGahan, (2009), "Outsourcing War: The Evolution of the Private Military Industry after the Cold War", SSRN Electronic Journal. 10.2139/ssrn.1496498.

⁴ James Pattison, "The Hazards of Going to War for Profit", Peace & Security Article United Nations University, 29 Oktober 2010

⁵ Francesco Francioni, "Private Military Contractors and International Law: An Introduction", The European Journal of International Law, Vol. 19 no. 5. 2008, Hal 961-964

⁶ *IBID.*

Dalam menjaga stabilitas keamanan negara, peningkatan kapabilitas keamanan sering dilakukan dalam memperkuat tatanan pertahanan. Peningkatan tersebut tidak lain menjadi dampak dari munculnya rasa cemas akan ancaman yang mungkin datang dari luar negara. Sebagaimana politik internasional digambarkan dengan sistem anarki sebagai dasarnya, para petinggi negara diharapkan untuk selalu mengedepankan keamanan negara. Maka dari itu, tatanan pertahanan menjadi hal utama yang wajib untuk ditingkatkan guna menjaga stabilitas negara yang terbebas dari ancaman. AS juga selalu mengedepankan kepentingan nasional guna menjaga stabilitas negara. Dengan begitu, negara tersebut selalu mengarahkan kekuatannya melalui berbagai cara dalam meningkatkan kapabilitas yang dimilikinya. Turut memiliki andil dalam berbagai operasi militer diyakini menjadi salah satu media bagi negara tersebut guna mencapai kepentingan nasionalnya.⁷

Dalam mengkaji hubungan AS di Timur Tengah, terdapat setidaknya 3 faktor utama yang mendukung terbentuknya intensi di antara kedua pihak. Terorisme, demokrasi, dan konflik antar pihak merupakan tiga faktor utama yang menjelaskan adanya kepentingan nasional negara tersebut yang harus dicapai⁸. Dalam pencapaiannya, berbagai cara dan kekuatan akan dikerahkan dalam menjaga kekuasaan yang ada. Kepentingan nasional tersebut pun terkait dengan adanya keinginan dalam menjaga tatanan pertahanan dan stabilitas keamanan negara tersebut. Pengaruh AS pun mengambil andil yang cukup signifikan dalam

⁷Robert O. Keohane, "Review: Alliances, Threats, and the Uses of Neorealism by Stephen M. Walt", *International Security Journal*. The MIT Press. Vol.13 No.1. 1988. Hal. 169-176

⁸ J. Pressman, "*Power without Influence: The Bush Administration's Foreign Policy Failure in the Middle East*", 2009, *International Security*, 33(4), 149–179.

kehidupan berpolitik kawasan tersebut.⁹ Salah satu negara di dalam kawasan Timur Tengah dengan intensi terbesar yang memiliki keterlibatan AS adalah Irak. Keberadaan negara tersebut di tengah-tengah Kawasan Timur Tengah diyakini menjadi salah satu cara dalam mempertegas kedudukan negara *super power* tersebut. Intensi yang dimiliki pun tidak lain dikarenakan adanya kepentingan nasional yang ingin dicapai. Kepentingan yang ada sudah pasti terkait dengan sektor kekuasaan dan keamanan, ideologi dan budaya, juga minyak dan kapitalisme¹⁰. Sektor kekuasaan dan keamanan mengacu kepada keberadaan AS sebagai negara besar dengan kapabilitas pertahanan yang terkuat. Ideologi pun menjelaskan adanya gerakan liberalisasi dalam menekan rezim pemerintah yang otoriter. Terakhir, adanya kepentingan minyak dan kapitalisme mengacu kepada sektor ekonomi yang ingin dikuasai oleh negara tersebut. Dengan begitu, operasi militer menjadi hal yang umum untuk dilakukan guna menjaga dan meningkatkan kapabilitas keamanan yang ada. Didukung dengan pernyataan oleh Rocky M. Mirza pada bukunya yang berjudul *American Invasion: Canada to Afghanistan, 1775 to 2010*, menyatakan bahwa Pemerintah AS sejak terdahulu selalu mengutamakan pemenuhan kepentingan negaranya. Hal tersebut mengarahkan pemerintah untuk tidak ragu dalam mengirim personilnya guna mencapai kepentingannya.

Dalam melakukan operasi militer guna mencapai kepentingan, revolusi strategi telah terjadi. Sejak tahun 1946 perusahaan keamanan swasta telah

⁹ Stephen Zunes, "Continuing Storm: The U.S. Role in the Middle East", Institute for Policy Studies, 1 April 1999

¹⁰R. Hinnebusch, "*The US Invasion of Iraq: Explanations and Implications. Critique: Critical Middle Eastern Studies*", 2007, 16(3), 209–228.

dimanfaatkan dan ditujukan guna penambahan personel logistik saat perang. Berangkat dari *Vietnam War* pada tahun 1955, perusahaan militer swasta mulai aktif diikutsertakan guna membantu personel militer nasional¹¹. Peningkatan privatisasi militer pada masa pemerintahan Bill Clinton disebut menjadi sumber kekuatan tambahan. Hal tersebut didukung dengan pemotongan gaji pemerintah dan mengalihkan anggaran kepada perusahaan keamanan swasta tersebut. Dijelaskan bahwa strategi yang diambil dipercaya akan meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya. Masuk ke dalam abad 21, keterikatan AS terhadap PMCs ditunjukkan dari keikutsertaan para perusahaan militer swasta dalam melakukan operasi militer. Terbukti dalam invasi Afghanistan pada tahun 2001 yang dilakukan sebagai bentuk balasan dari serangan Al-Qaeda. Berawal dari tragedi 9/11, Blackwater dan CACI sebagai perusahaan militer swasta pun menjalin kerja sama dengan *Central Intelligence Agency* (CIA) dalam melakukan aksi pemberantasan terorisme¹². Beranjak dari operasi tersebut, perusahaan militer swasta kembali digunakan pada tahun 2003 memasuki masa penggulingan Saddam Hussein di Irak. Kembali diyakini bahwa penggunaan PMCs akan jauh lebih menguntungkan jika dipandang dari banyak aspek dalam mempertimbangkan penggunaannya.

Privatisasi militer yang dilakukan AS menjadi polemik tersendiri. Hal tersebut muncul sebagaimana militer konvensional AS pada dasarnya selalu menduduki peringkat utama militer dengan sistem pertahanan terkuat di dunia¹³.

¹¹ David Isenberg, "Private Military Contractors and U.S. Grand Strategy, International Peace Research Institute, Oslo Report. 2009

¹² Jeremy Scahill, "Blackwater: CIA Assassins?", *The Nation*, 20 Agustus 2009.

¹³ Global Fire Power. "GlobalFirePower.com Rankings 2005-presents". Global Fire Power. 2021, diakses pada 12 Januari 2021. <https://www.globalfirepower.com/global-ranks-previous.asp>

Nilai tambahan seperti penghematan biaya, layanan yang dirasa lebih menguntungkan, kebebasan dari tanggung jawab menjadi suatu perdebatan sebagaimana aspek-aspek tersebut dirasa dapat didapatkan dari militer konvensional.

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Kepentingan Amerika Serikat (AS) di Irak muncul seraya meningkatnya beberapa faktor yang dianggap berpotensi menimbulkan ancaman di tengah kehidupan negara tersebut. Terorisme, ideologi, dan konflik antar pihak diyakini dapat mempengaruhi stabilitas keamanan negara tersebut. Intensi AS pun menguat terkait adanya insiden penggulingan Saddam Hussein sebagai pemimpin Irak. Penggulingan yang muncul sebagai akibat dari tuntutan pergeseran ideologi mengundang peran negara *superpower* tersebut sebagai penengah dari konflik yang ada. Tidak hanya itu, kepentingan lain seperti kepemilikan nuklir juga sumber daya minyak yang dimiliki oleh Irak mengundang kehadiran AS dalam mempertegas kedudukannya. Sikap protektif yang seringkali dinilai berlebihan diyakini karena adanya ketakutan akan persaingan. Maka dari itu, peningkatan kapabilitas keamanan yang diutamakan oleh negara tersebut terbilang sering melakukan adanya pembaharuan.

Dalam melakukan pembaharuan peningkatan kapabilitas militer, banyak faktor menjadi pertimbangan para pemangku keputusan, Anggaran menjadi salah satu

topik utama yang kerap kali diangkat oleh pemerintah AS dalam melakukan alokasi dana milik negara. Munculnya keurgensian peningkatan kapabilitas militer guna mengurangi ancaman pun dilakukan dengan mencari jalan keluar lain dari suatu permasalahan. Melihat hal tersebut, Upaya opsional pada akhirnya dinilai menjadi suatu hal yang diperlukan mengingat adanya kepercayaan kepada suatu instansi yang diyakini dapat mempermudah pencapaian kepentingan. Privatisasi militer melalui penggunaan PMCs memperlihatkan ketergantungan AS dalam menjadikannya sebagai jalan keluar dari suatu hambatan.

Keterikatan pada privatisasi militer menimbulkan pertanyaan besar mengingat militer konvensional AS menduduki urutan pertama dengan sistem pertahanan terkuat. Perdebatan tersebut pada akhirnya mempertanyakan bagaimana penggunaan PMCs hadir sebagai sebuah kebijakan oleh Bush dalam mencapai kepentingannya di Irak. (1) akuntabilitas negara pengguna jasa. Perdebatan tersebut mempertanyakan tanggung jawab AS daripada permasalahan yang diciptakan oleh para PMCs. Dimana hal tersebut diyakini secara langsung mempengaruhi pola perilaku AS dalam menjadikannya sebagai sebuah strategi. (2) legalitas penggunaan PMCs. Legalitas penggunaan PMCs pun merujuk kepada banyak pihak dan aktor hubungan internasional yang mempertanyakan perizinan atas perusahaan militer swasta untuk beroperasi. Penugasan personelnnya sebagai representasi AS dalam melakukan operasi militer menjadi pertanyaan besar. (3) Privatisasi Militer memperlihatkan pola perilaku politik AS terhadap Irak. Hubungan politik di antara kedua negara pun menjadi polemik yang diyakini tidak luput dari peran PMCs.

Keberadaan perusahaan keamanan swasta yang diyakini menjadi suatu bentuk upaya memunculkan pertanyaan atas dasar apa kebijakan tersebut terbentuk.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Dalam menulis penelitian ini, penulis membatasi lingkup penelitian guna melihat peran AS dalam menjadikan PMC sebagai strategi alternatif dalam mencapai kepentingannya di Irak. AS dibawah pimpinan George W. Bush Jr dan militer swasta menjadi aktor utama dalam mengkaji kajian ini. Penelitian ini juga akan dibatasi dengan tenggang waktu 2003-2011. Dipilih menjadi tahun penelitian dikarenakan Operasi militer AS di Irak terjadi pada tenggang waktu tersebut. Maka dari itu, pembatasan isu pada penelitian ini akan berfokus pada upaya Amerika Serikat menjadikan PMC sebagai upaya pemenuhan kepentingan di Irak.

1.2.3 Perumusan Masalah

Penelitian ini seperti yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah akan berfokus pada privatisasi yang terdapat dalam intensi AS terhadap Irak. Maka dari itu, terbentuklah pertanyaan penelitian: **“Bagaimana Amerika Serikat menjadikan *Private Military Contractors* sebagai upaya pemenuhan kepentingan dalam operasi militer di Irak?”**

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan upaya AS dalam menjadikan *Private Military Contractors* sebagai upaya pemenuhan kepentingan di Irak. Hal tersebut menarik untuk dikaji sebagaimana Amerika Serikat memiliki intensi berlebih. Pencapaian kepentingan nasional pun menjadi agenda utama oleh negara tersebut. Upaya pemenuhan yang terusik pada akhirnya memunculkan kebijakan privatisasi sebagai jalan keluar. Dengan begitu, penelitian ini ditujukan dalam membentuk gambaran penggunaan PMC sebagai suatu bentuk upaya opsional.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penulis berharap agar penelitian ini dapat berguna dalam menambah pengetahuan mengenai hubungan politik AS-Irak. Sebagaimana penulis berharap kajian ini dapat digunakan untuk mengetahui strategi AS dalam pencapaian kepentingan nasional. Adapun dalam meneliti, penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi para peneliti lainnya yang ingin mengkaji hal serupa. Maka dari itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam sebuah penelitian kajian privatisasi militer sebagai sebuah kebijakan AS terhadap Irak

1.4 Kajian Literatur

Dalam menganalisis kajian upaya pemenuhan kepentingan AS terhadap Timur Tengah terkait operasi militer di Irak. Penulis akan memaparkan tiga penelitian terdahulu yang telah dilakukan.

Tulisan pertama berasal dari karya Turcan M. dan Ozpinar N pada jurnal nya yang berjudul “**Who let the dogs out?**”. Menyatakan adanya penggunaan *Private Military Contractors* (PMCs) pada invasi Amerika Serikat (AS) terhadap Irak merupakan suatu hal yang sangat krusial. Peran perusahaan militer swasta yang dominan dianggap akan mempengaruhi hasil dari suatu konflik tempat mereka ditugaskan. Turcan dan Ozpinar memusatkan perhatian penelitiannya sebagai suatu kritik mengenai akuntabilitas, transparansi, juga persetujuan publik. Dimana hal tersebut dikatakan bahwa penggunaan PMCs hanya berakibat pada terhambatnya konstitusionalisme dan mengurangi transparansi di antara kedua negara. Kritik lainnya muncul dalam polemik perusahaan dengan AS sebagai pengguna jasa. Hadirnya privatisasi militer dinilai justru telah mengurangi ke-efektivitasan dalam upaya pencapaian kepentingan oleh negara pengguna jasa. Dikatakan pula bahwa PMCs pada dasarnya telah mengeksploitasi pemerintah AS yang belum berpengalaman dalam mempekerjakan para personel swasta tersebut. namun, disebutkan pula bahwa penggunaan perusahaan militer swasta dianggap sebagai jalur alternatif untuk menghindari jalur hukum. ¹⁴

¹⁴ M. Turcan, & N. Ozpinar, “*Who let the dogs out?*”: *A critique of the security for hire option in weak states*”, *Dynamics of Asymmetric Conflict*, 2009, 2(3), 143–171

Kajian selanjutnya berasal dari Katerina Dalacoura dengan judul *US Foreign Policy and Democracy Promotion in the Middle East: Theoretical Perspectives and Policy Recommendations*. Pada dasarnya jurnal tersebut mengkaji adanya intensi berlebih oleh Amerika Serikat terhadap kawasan Timur Tengah. Intensi yang muncul berdasar pada tragedi 9/11 terdapat kepentingan AS yang harus disampaikan. Demokrasi pun dinyatakan sebagai intensi utama yang dicanangkan terhadap kawasan tersebut di era kepemimpinan George W. Bush. Diawali dengan penjelasan mengenai Uni Soviet, persediaan minyak bumi dan Israel sebagai kepentingan AS di masa perang dingin, jurnal ini juga mengaitkan demokrasi ke dalam faktor penentu. Hal tersebut terjadi sebagaimana komunisme menjadi paradigma yang marak pada era tersebut. Dibawah pemerintah Bill Clinton pun demokrasi diperkenalkan pada kawasan Timur Tengah yang merujuk ke arah idealis dan pragmatik.

Dalacoura menyatakan peran AS kembali menguat pasca tragedi 9/11. Ketidakhadiran sistem demokrasi di dalam pemerintahan negara-negara kawasan Timur Tengah dianggap telah menyebabkan ancaman bagi AS. Masuknya demokrasi dipercaya akan menjauhkan para aktor yang ada didalam negara dari segala tindakan ekstrimisme dan terorisme. Keinginan interpretasi islam yang lebih moderat pun diharap dapat diterapkan. Dampak dari penyebaran demokrasi terdapat pada prasangka bahwa penyebaran ideologi digunakan untuk menetapkan keberadaan AS sebagai 'adikuasa' dalam sistem internasional. Usaha AS dalam mempromosikan demokrasi sebagai agenda kebijakan luar negeri menggiring opini publik akan keinginan negara tersebut untuk mencapai kepentingannya. Dengan

begitu, Obama muncul yang kehadirannya diyakini telah mengembalikan nama baik AS melalui prinsip internasionalisme liberal yang mengutamakan hak asasi manusia sebagai norma utama¹⁵,

Literatur ke-3 merupakan karya Ahsan I. Butt dalam jurnalnya yang berjudul *“Why Did the United States Invade Iraq in 2003?”*. Kajian tersebut menjelaskan polemiknya mengenai kepentingan nasional AS yang harus dicapai. Mendorong diri untuk berperang dikatakan oleh Ahsan sebagai suatu bentuk tindakan tegas dalam mempertahankan reputasi. Bukan hanya sekedar minyak, *Weapon Mass Destruction (WMD)*, ataupun ideologi demokrasi, namun hegemonlah yang ingin dicapai. Penggunaan militer nasional maupun swasta dinilai tidak patut untuk disalahkan karena konteks perjuangan AS dalam mencapai hegemonnya. Maka dari itu, kebijakan-kebijakan agresif yang diambil pada saat itu sangat mempengaruhi hubungan politik antara kedua negara.¹⁶

Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga pandangan disetiap kajian yang telah dipaparkan. Di satu sisi Turcan M. dan Ozpinar N memandang bahwa penggunaan PMCs hanya memperhambat jalannya operasi militer AS dalam mencapai kepentingannya. Keberadaan personil kontraktor swasta tersebut kerap kali hanya menimbulkan konflik yang berujung pada tidak jelasnya tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah AS sebagai pengguna jasa. Pada pandangan ke-dua

¹⁵ Katerina Dalacoura. “US Foreign Policy and Democracy Promotion in the Middle East: Theoretical Perspective Theoretical Perspectives and Policy Recommendations”. *Ortadogu Etutleri*. Volume 2. No 3. Juli 2010. Hal 57-76

¹⁶ Ahsan I. Butt. “Why did the United States Invade Iraq in 2003?”. *Journal Security Studies*. Vol. 28. 4 Januari 2019. Hal 250-285.

terdapat kajian mengenai intensi AS terhadap kawasan Timur Tengah yang meliputi faktor ideologi sebagai acuan utama. Berdasar pada tragedi 9/11, AS merasa terusik dan menganggap upaya dalam mencapai kepentingan nasionalnya telah terhambat. Terakhir, terdapat pandangan Ahsan I. Butt yang mengkaji invasi Irak. terdapat polemic mengenai keinginan penyebaran ideologi yang menjadi tujuan utama AS. Adapun prasangka lain dijelaskan oleh Ahsan mengenai keinginan AS sebagai negara hegemon.

Melihat dari kajian yang telah dipaparkan, penulis melihat bahwa literatur yang ada belum menyentuh kebijakan privatisasi militer melalui penggunaan PMC sebagai upaya opsional AS. Penelitian yang ada hanya sebatas penjelasan mengenai intensi AS terhadap Irak, dan penggunaan PMCs yang menghambat upaya pencapaian kepentingan nasional. Adapun PMC dipercaya hanya digunakan untuk menghindari jalur hukum. Maka dari itu, dipertanyakan keberadaan militer swasta tersebut yang memperdebatkan keberadaanya sebagai penghambat atau mempermudah.

1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam Mengkaji dan menjawab pertanyaan penelitian yang diangkat, penulis akan memakai satu konsep utama. Hal tersebut akan menjadi acuan bagi penulis untuk melakukan eksplorasi data di Bab II. Dilanjutkan dengan Bab III untuk menganalisis dengan menggunakan konsep Security Governance. Berikut pemaparan konsep utama yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini.

Security Governance hadir dari dua kata berbeda yakni *Security* dan *Governance*. Muncul pasca perang dingin, konsep *Security governance* pada dasarnya mengkaji adanya transformasi dan fragmentasi pada sektor keamanan pada kala itu. Mendasari pada konsep *Security*, pemahaman keamanan sebagai sebuah kerangka pemikiran diperdalam dalam melihat relasinya dengan aktor lain selain negara. Selanjutnya melalui pemenggalan kata *Governance*, konsep ini mengartikan adanya suatu proses tata kelola bagi aktor publik maupun swasta untuk saling bergantung dan berkoordinasi dalam mencapai kepentingan masing-masing pihak.

Analisis keamanan yang terlalu beragam membutuhkan dasar yang dapat menjelaskan adanya perubahan fokus. Mengartikan bahwa dalam meneliti keamanan konsep tersebut ingin memperlihatkan dan menggambarkan suatu fenomena. Penggambaran suatu kejadian merujuk kepada perbedaan dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan keamanan terkait keberadaan suatu negara yang pemangku kekuasaannya ingin menjalin relasi dengan aktor non-tradisional, sebagaimana sudah sempat disinggung sebelumnya¹⁷. Hal tersebut terkait penggunaan dan keterikatan pada sumber daya keamanan seperti Perusahaan keamanan swasta, organisasi non-pemerintah, maupun organisasi internasional.

Level analisis konsep ini diperluas dan membuat perkembangannya berciri khas pada fragmentasi otoritas politik. Hal tersebut pun merujuk pada keterlibatan

¹⁷ *IBID.*

aktor publik dan swasta juga menjangkau isu militer maupun non-militer¹⁸. Adapun, konsep *security governance* menjelaskan kerangka pemikiran ini secara garis besar membahas teknis pengaturan keamanan. Keefektifan suatu kebijakan dalam menyelesaikan suatu masalah menjadi perhatian utama untuk dinilai.

Berangkat dari dasar tersebut, terbentuk tiga poin utama yang menjadi dasar pembentukan konsep *Security Governance* menjadi sebuah alat untuk menganalisis fenomena. Pertama, kebutuhan akan prasyarat mengingat koordinasi diperlukan dikarenakan aktor yang bersifat plural. Kebutuhan dan kepentingan yang saling berketergantungan menimbulkan tujuan bersama. Hal tersebut pun sekiranya mengundang pemerintah untuk melakukan upaya keamanan sebagai sebuah keharusan fungsional dan keyakinan negara tersebut. Kedua, menjelaskan struktur konsep yang ada dalam melihat kooperasi antar aktor dan mekanisme di dalamnya. Vam Kersbegen dan Van Waarden dalam rangkuman penelitian *cross-disciplinary* menyatakan bahwa konsep *security governance* pada dasarnya bersifat plural antara sektor publik dan swasta. Hierarki dirasa kurang penting dalam mengutamakan kooperasi mekanisme. Dengan begitu, struktur yang ada pada umumnya berdasar pada pluralistic aktor dalam mekanisme sukarela dan kerjasama yang heterarki. Ketiga, pengaplikasian konsep *security governance* menjelaskan bagaimana konsep tersebut dapat bekerja. Koordinasi dibutuhkan guna membangun konsep yang ada agar dapat membentuk respon yang dirasa efektif dan diterima oleh tananan global. Adapun dasar pemikiran ini ingin menunjukkan bahwa jalan keluar dan penyelesaian

¹⁸ Elke Krahan, "Conceptualizing Security Governance", *Cooperation & Conflict*, 1 November 2003, Vol. 38 Sage Pub, hal. 5-26

masalah dapat dicapai terlepas penggunaan sumber daya utama. Efektivitas pun menjadi ekspektasi utama dengan menekankan legitimasi yang setianya berjalan bersama konsekuensi. Dengan begitu, security governance mengarahkan pengimplementasian kebijakan keamanan yang sekiranya efektif, efisien, dan aksi¹⁹. Berdasar pada pemahaman konsep security governance yang sudah dipaparkan, dapat dilihat bahwa pada dasarnya konsep ini menjelaskan adanya informalisasi akan sistem keamanan. Marketisasi dan swastanisasi terbentuk sebagaimana privat dan publik dielaborasi dalam mencapai kebutuhan pasar.

Dilanjutkan dengan pandangan mengenai kepentingan nasional yang dikemukakan oleh Donald E. Nuechterlein. **Konsep national interest** dijelaskan sebagai suatu gambaran yang memperlihatkan adanya tujuan dan aspirasi daripada suatu entitas yang berdaulat di dalam ranah internasional²⁰. Pengertian terhadap konsep tersebut dilihat dari 3 faktor yang berbeda. Persepsi sebagai faktor pertama menghadirkan pengertian mengenai kebutuhan suatu negara²¹. Kebutuhan tersebut pada hakikatnya akan mempengaruhi proses politik didalam suatu negara. faktor kedua ialah keberadaan national interest sebagai satu konsep yang pada dasarnya berdiri diatas negara yang berdaulat. Hal tersebut menggambarkan negara sebagai aktor utama yang berdiri tunggal secara independen dan tidak tergantung dengan negara lain atau organisasi internasional. Faktor ketiga adalah keberadaan kepentingan publik yang dinilai telah memperlihatkan adanya perbedaan kebutuhan

¹⁹ Hans-George Ehrhart, Hendrik Hegemann & Martin Kahl. "Towards Security governance as a critical tool: a conceptual outline", *European Security*, 2004, hal. 145-162

²⁰ D. E. Nuechterlein, "National interests and foreign policy: A conceptual framework for analysis and decision-making", *British Journal of International Studies*, 1976, 2(03), 246.

²¹ *IBID.*

yang dipengaruhi dari sisi domestik maupun eksternal. Faktor terakhir menjelaskan adanya pembentukan definisi kepentingan nasional. Dinyatakan hal tersebut didasari kepentingan itu sendiri yang menjadi kebutuhan suatu ‘negara-bangsa’ bukan kelompok tertentu atau hanya organisasi politik.²²

Dipercaya akan mempengaruhi pembentukan kebijakan luar negeri suatu negara, terdapat setidaknya 4 jenis kepentingan nasional yang dikelompokkan sesuai sektor kepentingannya. *Defence interest* menjelaskan adanya kepentingan guna proteksi negara-bangsa dalam mencegah adanya ancaman yang berasal dari negara lain²³. *Economic interest* memperlihatkan kepentingan ekonomi negara yang stabil juga hubungannya dengan negara lain. *World order interest* mengkaji adanya pemeliharaan politik internasional dan ekonomi sistem dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara²⁴. Ke-4 adalah ideological interest yang menyatakan adanya proteksi terhadap nilai-nilai yang dipegang oleh suatu negara-bangsa²⁵. Nilai-nilai tersebut pun berdasar pada norma yang dipercaya baik secara universal. Dengan begitu, *national interest* suatu negara pada umumnya harus dipenuhi demi keberlangsungan kehidupan bernegara.

²² *IBID.*

²³ *IBID.*

²⁴ *IBID.*

²⁵ *IBID*

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dalam menulis penelitian ini. Mengacu pada John Creswell sebagai landasan utama, metode tersebut dijelaskan sebagai pendekatan yang mengharuskan adanya interpretasi mandiri bagi para peneliti. “Penelitian kualitatif adalah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang dikaitkan dengan masalah sosial atau manusia. Proses penelitian melibatkan pertanyaan dan prosedur. Analisis data secara induktif dibangun dari hal khusus hingga tema umum, dan peneliti membuat interpretasi tentang makna suatu data”²⁶. Dengan begitu, metode kualitatif menjelaskan analisis yang terbentuk atas interpretasi akan data memunculkan penelitian yang fleksibel. Dengan kata lain, metode kualitatif merupakan metode penelitian yang menggunakan data dan fakta untuk menjawab pertanyaan penelitian. Menguji teori untuk mengevaluasi program atau menjelaskan beberapa fenomena, membuat metode penelitian kualitatif mementingkan adanya hubungan kausalitas dan tergantung pada interpretasi sang peneliti.²⁷

Jenis penulisan yang dipilih berdasar pada fenomena. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Umar Suryadi dan John W. Creswell dalam melakukan penelitian

²⁶ John W. Creswell, "Mixed-method research: Introduction and application." In *Handbook of educational policy*, Academic Press, 1999, hal. 455-472

²⁷ Umar Suryadi Bakry, “Metode Penelitian Hubungan Internasional”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)

kualitatif yang harus didasari oleh interpretasi data. Data tersebut berasal dari fenomena yang terjadi di tengah dunia internasional dan dipilih oleh penulis karena memiliki daya tarik bagi peneliti. Penelitian menggunakan metode kualitatif pada akhirnya dipilih karena penulisan akan berdasar pada fenomena. Sehingga data yang akan diambil dari berbagai sumber dinilai tepat dalam menggunakan metode kualitatif. Adapun metode tersebut dianggap komprehensif dan dapat mempermudah analisis dalam meneliti topik yang akan dibahas.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan jenis data sekunder dalam melakukan penelitian. "Secondary data is data obtained by somebody else and "inherited"²⁸ by the researcher" dinyatakan oleh Arthur Cropley sebagai definisi dari data sekunder. Dengan begitu, menjelaskan makna dari data sekunder yang digunakan guna mencapai tujuan tertentu.

Dengan begitu, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mencari data-data yang relevan. Pencarian data ini akan dilakukan melalui buku, artikel, jurnal, dan penelusuran internet²⁹. Penulis juga menggunakan metode berbasis dokumen untuk mendapatkan dokumen sekunder. Mengambil dokumen melalui jurnal-jurnal yang pernah meneliti topik serupa pun

²⁸ Arthur Cropley, "Introduction to Qualitative Research Methods", Riga Latvia. University of Hamburg, 2015

²⁹ Bruce L. Berg dan Howard Lune, *Qualitative Research Methods for the Social Sciences* (Boston: Pearson, 2018), Hal. 213.

akan menjadi hal dominan yang sangat berguna dalam menganalisis penelitian ini. Triangulasi juga akan dimanfaatkan dalam mengampu penelusuran data.

1.7 Sistematika Pembahasan

Dalam melakukan penelitian ini, sistematika pembahasan dipaparkan dibawah ini:

Bab I “Pendahuluan”, Dalam bab ini terdapat latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan permasalahan, pembatasan masalah, kajian literatur, kerangka pemikiran, metode yang akan digunakan dan sistematika pembahasan. Dengan begitu, ke-delapan sub-bab tersebut akan menjadi fondasi dasar dalam penelitian.

Bab II “Kepentingan Nasional Amerika Serikat di Timur Tengah: Invasi Irak oleh Bush Menggunakan *Private Military Contractors*”, dalam bab ini penulis akan menjelaskan ideologi, sumber daya, dan kapabilitas keamanan Irak sebagai faktor krusial dalam naungan kepentingan nasional. Selanjutnya, peneliti memaparkan keterlibatan PMCs saat invasi berlangsung. Kemudian, muncul Peningkatan perasaan terancam oleh AS sebagai bentuk pemaparan mengenai aksi global war on terror di Irak dan respon negara tersebut dalam menghadapi tuduhan yang diberikan. Bab ini akan menyajikan data yang akan dianalisis pada bab III. Maka dari itu, bab ini akan dibagi menjadi 3 sub-bab.

Bab III “Penggunaan *Private Military Contractors* Sebagai Upaya Pemenuhan Kepentingan Amerika Serikat”, dalam bab ini penulis menganalisis mengenai

penggunaan *Private Military Contractors* sebagai upaya opsional dalam pemenuhan kepentingan. Pembahasan memanfaatkan data yang terdapat pada bab II dan data tambahan. Analisis akan diawali dengan analisis invasi Irak sebagai reaksi terhadap kepentingan nasional AS yang terhambat. Dilanjutkan dengan upaya Amerika Serikat dalam mencapai kepentingannya di Irak. Dengan begitu, penulis menganalisis pula bagaimana *Private Military Contractors* muncul sebagai strategi opsional yang dapat menyelesaikan hambatan yang ada. Maka dari itu, bab ini akan dibagi menjadi tiga sub-bab

Bab IV “Kesimpulan”, pada bab ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian dari kajian yang telah dianalisis.